

TINJAUAN SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT PAPUA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS*

Franzalbert Joku

Tokoh Masyarakat Papua, Jayapura

Latar Belakang

West New Guinea (Irian Barat) adalah wilayah jajahan terakhir pemerintahan kolonial Belanda yang dikembalikan kepada Indonesia melalui Resolusi 2604 Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah melalui perundingan panjang dan konfrontasi militer (Tripora), dibawah tekanan Amerika Serikat dan Inggris. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia secara resmi tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963, hampir 18 tahun sejak Proklamasi dan pembentukan NKRI. Papua, sebelum integrasi sempat berada dibawah kekuasaan pemerintahan sementara (UNTEA) selama enam bulan.

Sesungguhnya pada bulan April 1961 Pemerintah Kolonial Belanda telah membentuk Dewan Papua (*Nieuw Guinea Raad*) melalui pemilihan umum satu orang satu suara, dan sejalan dengan pembentukan DP, maka dibentuklah satu batalyon sukarelawan Papua (PVK) yang cikal-bakal menjadi Tentara Nasional Papua (kemudian setelah integrasi menjelma menjadi TPN-OPM atau Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka).

Melalui ketetapan Pemerintah Kolonial Belanda Nomor: 68/1961 sempat disahkan Bendera Bintang Kejora dan "Hai Tanahku Papua" sebagai Bendera dan Lagu Kebangsaan Papua.

Sejak 1963 hingga hari ini, Provinsi Papua, sepanjang 45 tahun bergabung diri di NKRI, tidak pernah luput dari permasalahan. Tulisan ini dan kajian lain yang telah banyak dilakukan adalah bagian dari upaya-upaya yang terus saja berlanjut, baik yang bersifat rahasia di tingkat pimpinan negara dan pihak keamanan, maupun pemerintahan sipil, *civil society* para LSM dan masyarakat pada umumnya. Yang perlu digarisbawahi secara khususnya adalah konflik politik (vertikal) sejak pecahnya pemberontakan bersenjata

* Tulisan ini disampaikan pada Pertemuan Kelompok Ahli, BPPK-Departemen Luar Negeri, Bangka-Belitung, 10-11 Desember 2008

TPN-OPM untuk pertama kalinya pada tanggal 27 Juni 1965 di Kabupaten Manokwari, disusul berbagai pemberontakan serupa hampir terjadi di seluruh tanah Papua, yang dikenal sebagai provinsi sarat konflik.

Harus jujur diakui bahwa akumulasi berbagai masalah, khususnya pelanggaran HAM berat oleh ABRI (1964-2002), termasuk pembunuhan Pemimpin Papua alm. Dorthays Hiyo Eluay (November 2001); eksploitasi sumberdaya alam yang tidak memberi manfaat pada rakyat; perampokan kekayaan hutan (*illegal logging*) dan hasil laut (*illegal fishing*); negara secara membabi-buta memfasilitasi proses pengasingan atau aliansi tanah (*land alienation*); serta praktek diskriminasi lainnya di sektor ekonomi; selain kegagalan pemerintah membangun perlindungan (*protection*), keadilan (*justice*) dan kesejahteraan (*prosperity*) untuk masyarakat asli di Tanah Papua, merupakan akar dari semua ketidakpuasan terhadap Pemerintah Indonesia yang bermuara pada kegiatan separatisme atau tuntutan Papua merdeka.

Realitas Sosial-Politik di Papua

Pada tahun 1973 bersamaan dengan ekspor perdana biji emas dan tembaga oleh PT. Freeport Me MoRan Inc, di Tembagapura, oleh Presiden Soeharto, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Tahun 2000 oleh Presiden Gusdur, nama Irian Jaya dikembalikan pada nama aslinya Papua. Pada tanggal 22 Oktober 2001 Provinsi Papua mulai diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Pada intinya UU Otsus Papua diterapkan sebagai *treatment* percepatan pembangunan masyarakat asli Papua melalui empat pilar utama yaitu: Keberpihakan pada masyarakat asli Papua (*Affirmation*), Proteksi terhadap hak-hak orang asli Papua (*Protection*), Partisipasi penduduk asli dalam pembangunan (*Participation*), dan Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment*).

Luas wilayah seluruh Tanah Papua adalah: 42.198.100 Ha, atau 20% dari luas wilayah nusantara. Disana terdapat dua Provinsi (Papua dan Papua Barat). Jumlah Penduduk: 2.646.489 jiwa (*Biro Pusat Statistik 2005*) meliputi penduduk asli (suku bangsa Papua ras Melanesia): 1.460.846 jiwa, terdiri dari 316 suku/clan, dan 68% atau 988.600 diantaranya hidup dibawah garis kemiskinan. Fakta ini adalah hal yang sangat ironis dan menyakitkan bagi masyarakat yang semakin menyadari tentang nilai dan betapa pentingnya kekayaan alam yang dimilikinya. Jumlah penduduk non-Papua (pendatang dan

transmigrasi) yang tinggal di Tanah Papua adalah sebesar 1.185.643. Karena pengalaman dan pengetahuannya, kelompok pendatang sampai hari ini menguasai dan mengendalikan semua sektor perekonomian di Papua dan Papua Barat.

Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*) bagi orang Papua rata-rata \pm 65,2 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Papua menempati peringkat nasional ke 33, berarti yang terendah diantara 33 provinsi yang berada di Indonesia. Dalam kurun waktu 45 tahun berintegrasi dalam NKRI, Papua menghasilkan baru 2 (dua) Profesor dan 13 Doktor (6PS Papua 2006). Penduduk usia kerja (15-60 tahun): 1.169.796 orang (Papua dan Papua Barat), pengangguran lebih banyak terdiri dari kaum perantau dari berbagai daerah lain di Indonesia yang membanjiri Tanah Papua guna mencari kerja menyambung hidup mereka (*skilled jobless*), sedangkan perbandingan angka bagi orang Papua tergolong rendah (*unskilled jobless*) setelah Otsus. Pada sisi lain kehadiran saudara-saudara dari luar Papua, seringkali menjadi penyebab konflik sosial bermuatan SARA (suku, agama, ras/antar golongan).

Di Papua terdapat 27 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Sejak 2006 terjadi penambahan sebanyak 12 Kabupaten baru hasil pemekaran dari 27 Kabupaten induk. Karena keterbatasan anggaran pemerintah dan sulitnya medan dengan kondisi geografis yang sangat berat, praktis kabupaten pemekaran tidak lebih dari simbol-simbol pemerintahan daerah saja, sekalipun mereka memiliki pimpinan pemerintahan sendiri atau *care-taker* bupati, namun belum semuanya memiliki perangkat pemerintahan dan sarana perkantoran. Ini berarti, jika dilihat dari sisi penduduk (*population*) dan angka kemiskinan yang begitu tinggi dan menakutkan, maka sesungguhnya pemekaran wilayah bukanlah solusi yang dicari untuk menyelesaikan akar permasalahan di Tanah Papua. Sementara itu, keseriusan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk membangun Papua dapat dilihat dari angka alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar 2% dari DAU nasional. Setiap tahun angka ini meningkat searah dengan pertumbuhan DAU nasional. Dalam tiga tahun terakhir, APBD Papua membengkak: Tahun 2006, APBD Provinsi Papua sebesar Rp.3,9 trilyun, 2007 APBD mencapai Rp.4,53 trilyun dan APBD 2008 menjadi Rp.5,45 trilyun (Rp.3,59 trilyun merupakan Dana Otonomi Khusus).

Alokasi Dana Otonomi Khusus ditujukan sebagai sumber pembiayaan percepatan pembangunan di sektor Pendidikan, Kesehatan, Perbaikan Gizi Penduduk Asli, Pemberdayaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Anehnya, alokasi APBD 2008 untuk sektor Pendidikan hanya 4,19% dan

Kesehatan 15%. Padahal kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan masyarakat Papua merupakan salah satu sumber ketidakpuasan masyarakat dan karenanya, penolakan terhadap Otonomi Khusus Papua terus saja disuarakan.

Bantuan dana pemerintah pusat melalui Dana Otonomi Khusus setiap tahun bertambah terus, namun berbanding terbalik kalau melihat realita objektif tentang tingkat kemiskinan absolut yang masih melanda masyarakat di kedua Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil kajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) tahun 2007, Provinsi Papua menduduki urutan kedua setelah Provinsi Riau, sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Sehingga tidaklah mengherankan, jika provinsi terluas dengan populasi penduduk terendah, kucuran anggaran yang sangat besar, namun rakyatnya masih hidup dalam kondisi jaman pra-sejarah. Kondisi hidup rakyat Papua yang miskin, bodoh dan tertinggal, setelah 45 tahun berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 7 tahun dalam buaian dana Otsus, tidak banyak melahirkan perubahan substantial atau *significant* yang benar-benar dapat menyentuh masyarakat asli. Kecenderungan untuk melontarkan stigma dan label oleh Pemerintah dan kaum pendatang yang mengidentikkan orang asli Papua sebagai komunitas warga yang masih bodoh, terbelakang, pemabuk, GPK-OPM, malas, dan sebagainya, justru telah melahirkan semangat baru yang mendorong kaum muda dan mahasiswa Papua menyatakan ketidakpuasan terhadap Pemerintah dan ingin melepaskan diri dari NKRI.

Di lingkungan pemerintahan, nampak jelas bahwa sebagian dana, selain alokasi dana yang berlebihan guna membiayai *bourgeois* birokrasi atau *safari suit brigade* (brigade jas safari) yang berpesta-pora di kota-kota, sementara rakyat tinggal menderita. Ketidakseriusan pemerintah daerah memahami dan menangani ketertinggalan Papua telah menempatkan masyarakat asli pada sisi yang semakin tidak mempercayai pemerintah. Apabila kondisi masyarakat asli yang miskin, bodoh dan terbelakang merupakan suatu proses pembiaran, maka tidak salah bila mereka menilai semuanya itu sebagai bagian dari

Semangat integrasi penuh retorika dan slogan-slogan murahan tentang kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, tergerus oleh realitas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan absolut.

systemic dan *systematic genocide*. Dan apabila hal seperti ini dibiarkan berlanjut, maka akan selamanya menjadi komoditi dan isu yang laris dijual oleh berbagai kelompok intelektual anti integrasi dan juga NGO's nasional dan internasional sebagai upaya pembasmian orang Papua yang disponsori oleh negara.

Meredam Internasionalisasi Isu Papua

Wilayah Papua merupakan lahan subur bagi koruptor (KKN), para pejabat daerah menjadi raja-raja kecil yang korup, dipelihara untuk kepentingan pejabat pemerintah pusat dan daerah, mereka kebal hukum. Papua merupakan wilayah penyebaran epidemi HIV/AIDS tertinggi di Indonesia.

Kekayaan sumberdaya alam khususnya hutan, laut dan tambang di eksploitasi secara membabi-butu, menghasilkan trilyunan rupiah untuk kepentingan segelintir elite pengusaha dan penguasa. Sementara pada sisi lain, ratusan ribu rakyat Papua ras melanesia, lebih dari setengah diantaranya berasal dari 8 kabupaten di wilayah pegunungan tengah, dan dari keluarga sangat-sangat miskin, meratapi dan menjalani kehidupan tanpa kepastian. Pada tingkatan kelas menengah, pengusaha asli Papua sangat sulit memperoleh peluang dan aksesibilitas ekonomi dan perbankan, sehingga selama 45 tahun dalam NKRI, pengusaha asli Papua tidak mampu berkembang. Seluruh sektor ekonomi dikuasai oleh kelompok pendatang (non-Papua).

Meskipun integrasi Papua kedalam Republik Indonesia, telah sah dan melalui mekanisme formal yang didesain Amerika Serikat dan disetujui PBB, namun persoalan utama dari kemelut Politik Papua tetap tidak terselesaikan selama 45 tahun penggabungan Papua (Irian Barat) dalam NKRI. Penanganan berbagai gejolak politik di Papua melalui pendekatan persuasif dan represif bersifat sementara (memadamkan api). Semangat cinta tanah air yang sering ditanamkan, sarat ritualistik, sloganisme dan seremonial tersebut belum mampu menggugah semangat integralisme warga asli Papua dalam keutuhan NKRI. Semangat integrasi penuh retorika dan slogan-slogan murahan tentang kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, tergerus oleh realitas kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan absolut.

Harus diakui bahwa dalam 3 tahun terakhir kondisi Papua dan Papua Barat relatif kondusif. Selain perhatian pemerintah pusat semakin besar, terbukti dari meningkatnya alokasi Dana Otonomi Khusus Papua, keseriusan pemerintah pusat mempercepat pembangunan di Papua antara lain lahirnya

Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui Inpres No: 5 Tahun 2007 yang bertujuan melaksanakan percepatan pembangunan di kedua provinsi di ujung timur Indonesia, berdasarkan kebijakan pendekatan baru (*The new deal policy for Papua*) konon dana pelaksanaan Inpres telah diplot mencapai 17 trilyun rupiah, yang di prioritaskan pada: Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan; Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas ke wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara; dan Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putera-puteri asli Papua.

Inpres tersebut diatas merupakan salah satu solusi percepatan, namun akibat dari krisis keuangan global dan nasional, praktis Inpres yang terkesan sangat menarik, mati suri sebelum dirasakan manfaatnya, akibat tidak adanya dana pendukung. Kecuali Polri yang menyikapi kebijakan Presiden SBY tentang perlakuan khusus bagi pengembangan kualitas SDM putera-puteri asli Papua melalui penerimaan 1.500 Bintara Polisi khusus yang terdiri dari putera-puteri asli Papua yang telah dididik di Pulau Jawa dan Bali dengan masa pendidikan lebih lama dari Bintara Polri reguler. Di sektor lainnya belum ada terapi yang jelas dan memadai.

Sesungguhnya pandangan dan harapan dunia internasional tercermin dari pernyataan Anggota Kongres Amerika Serikat, Eni Faleomavaega mengatakan: *".. Saya kira Jakarta akan mengambil tanggungjawab yang lebih besar dan bukan hanya menghambur-hamburkan uang lalu mengharapkan orang Papua menggapai keberhasilan ketika mereka tidak memiliki cukup insinyur, dokter, pengacara, pengusaha untuk membentuk inti dari pemerintahan otonomi khusus"...* *"saya lebih suka melihat sesuatu yang membuat orang-orang Papua mendapatkan akses kepada pendidikan yang lebih baik, usaha ekonomi yang mandiri, pelayanan kesehatan yang baik, dsb..... Anda tidak bisa makan otonomi ..."* (Pernyataan Eni Faleomavaega, di harian The Straits Times, Singapore, edisi 14 Des 2007).

Kita tidak mungkin membiarkan rakyat Papua menjalani hidup mereka dalam kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakpastian ditengah kelimpahan dana otonomi khusus dan kucuran dana pembangunan. Kita tidak mungkin membiarkan rakyat Papua meratapi masa lalu dan mengais nasib di atas puing-puing ketidakpastian masa depan. Kita tidak mungkin membiarkan rakyat Papua menjadi boneka di negerinya sembari menonton hiruk-pikuk pembangunan yang sarat KKN. Para penguasa berkolusi ria dengan pengusaha non-Papua, menjadikan kemiskinan dan ketertinggalan rakyat Papua sebagai

trade mark atau merek dagang dan objek eksploitasi kepentingan ekonomi mereka.

Momentum 45 tahun integrasi Papua dalam NKRI hendaknya menjadi landasan kokoh yang akan menggerakkan sebuah perubahan ekonomi yang berorientasi pada *community-based business* dan kewirausahaan (*entrepreneurship*), semangat pemberdayaan (*empowerment*), serta kehidupan masyarakat yang berorientasi pada usaha ekonomi dan perkoperasian. Kita tidak perlu bermimpi bahwa masyarakat internasional akan membantu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan rakyat Papua. Dunia sangat tidak peduli. Keprihatinan Anggota Konggres USA pada dasarnya menekankan agar masyarakat Papua mencapai kualitas politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih baik, sebagaimana yang tersirat dalam tujuan otonomi khusus Papua dan konvensi PBB yang telah diratifikasi Indonesia.

Idealnya kita memanfaatkan keprihatinan LSM dan masyarakat internasional pada umumnya sebagai landasan guna membangun gerakan revolusi ekonomi masyarakat Papua. Gerakan revolusi ekonomi rakyat, sangat dibutuhkan sebagai *trigger* atau *catalyst* percepatan pembangunan di Papua, mengingat bahwa hingga saat ini pola pendekatan pembangunan tetap saja dalam paradigma lama (orde baru). Rakyat Papua termarginalisasi dengan stigma separatisme, GPK, masih primitif, bodoh, pemabuk, miskin, dll, sebagai alat legitimasi untuk menggusur mereka dari seluruh akses ekonomi.

Kendatipun jabatan birokrasi pemerintahan dan politik dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota bahkan distrik, diduduki oleh orang-orang asli Papua, namun mentalitas kita tidak lebih baik dari perilaku pemerintah kolonial atau penjajah sebelumnya. Para birokrat telah menjadi raja-raja kecil sarat KKN. Ternyata kebijakan afirmasi, proteksi dan partisipasi rakyat Papua dalam seluruh proses pembangunan yang menyangkut diri dan negerinya belum dipahami baik oleh para pejabat dan penguasa di daerah, sehingga tidak boleh heran apabila penduduk asli Papua yang kurang dari dua juta jiwa, tidak mampu disejahterakan. Sehingga diperlukan suatu aksi nyata agar segera mengambil sebuah langkah awal yang akan membawa pembaharuan dan pembangunan secara riil.

Pada dasarnya, *instant treatment* yang diharapkan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan rakyat Papua dari penderitaan dan prospek pembasmian total, antara lain:

1. Pemerintah memberikan perhatian dan afirmasi yang lebih luas pada semua upaya peningkatan SDM baik didalam maupun di luar negeri.

2. Memberikan proteksi dan afirmasi pada semua upaya kelompok masyarakat asli di sektor ekonomi, membuka aksesibilitas pada sistem perbankan dan meminimalisasi praktek diskriminasi terhadap orang Papua yang masih saja terjadi.
3. Membuka aksesibilitas masyarakat pada semua klinik dan rumah sakit dengan pelayanan kesehatan secara gratis. (Saat ini rumah sakit bisa gratis tapi obatnya tidak gratis, kalau obat yang gratis tidak ada).
4. Memberikan aksesibilitas rakyat mengelola sumberdaya alamnya, tanpa larangan dari aparat keamanan. Sebagaimana diketahui bahwa semua hutan di Papua telah dikavling oleh segelintir pengusaha HPH di Jakarta. Masyarakat adat pemangku hutan hanyalah komunitas yang menumpang di hutan milik para tengkulak non-Papua dari Jakarta.
5. Menghilangkan pola perencanaan pembangunan ala orde baru dimana rakyat Papua sebagai objek, dan semua pekerjaan pernbangunan yang sumber dananya dari pemerintah, dilaksanakan oleh kelompok pendatang (non-Papua). Saatnya rakyat Papua diberi keleluasaan.
6. Merencanakan dan membangun apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah seharusnya hanya menyediakan dana dan melakukan supervisi, dan berilah kepercayaan agar masyarakat merasa bahwa benar-benar mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada orang Papua yang memiliki dan membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas Bangsa dan Negara baik dari daerah sampai ke pusat. Apakah benar Tanah Papua dianggap milik Republik hanya karena politik kepentingan, sementara orang Papua dibuai dengan dana otsus dan isu-isu lokal lainnya (baik yang riil maupun yang sengaja diciptakan) dan tidak diperbolehkan untuk ikut memiliki, mengelola dan menikmati kekayaan bumi Nusantara.

Kesimpulan dan Penutup

Tuntutan Papua merdeka dan internasionalisasi isu tersebut akan terus saja terjadi dan kemungkinan besar akan meluas, bilamana pemerintah tidak konsekuen dalam komitmennya dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk membangun Papua di segala bidang: HAM dan keadilan, demokrasi dan *good governance*, SDM (pendidikan), pelayanan dan mutu kesehatan,

kesejahteraan lewat ekonomi kerakyatan, *institutional capacity building*, dan infrastruktur strategis untuk membuka isolasi daerah, dengan memperhatikan unsur keberpihakan.

Dilain sisi, perlu disadari oleh semua pihak, bahwa konsep perjuangan kemerdekaan nasional yang bangkit pasca Perang Dunia Ke-II sudah seharusnya dianggap "kadaluarsa" dilanda arus era globalisasi dengan akibat beragam yang sedang merubah dunia dengan pesatnya. Masyarakat Papua harus menerima bahwa *we have indeed missed the train* (kami sesungguhnya sudah ketinggalan kereta). Sangatlah keliru bila tokoh-tokoh di Papua mendesak masyarakatnya memilih untuk terus meratapi sejarahnya tanpa memberikan perhatian terhadap perubahan lingkungan dan zaman atau kesiapan diri untuk ikut mengantisipasi perkembangan menarik dan drastis di masa-masa yang akan datang.

Istilah dekolonisasi sudah jarang terdengar dalam *vocabulary* politik dunia. *Independence* atau kemerdekaan sudah berkembang menjadi *interdependence* dengan mengedepankan budaya untuk saling menunjang. Sementara para pemimpin negara-negara G-8 hampir dalam semua pertemuannya menjadikan topik utama pembahasan tentang kemampuan pemerintah untuk memberi makan kepada penduduk dunia yang semakin bertambah, berkurangnya kekayaan dalam dan cara-cara pengelolaan lingkungan yang lebih bersahabat atau berkesinambungan.

Semua pihak harus mampu membedakan antara pernyataan dukungan oleh pihak-pihak luar terhadap perjuangan Papua merdeka, ketimbang ekspresi kemanusiaan dan keprihatinan yang dinyatakan atas berbagai bentuk ketidakadilan, kelalaian dalam pembangunan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi di Papua. Dapat dikatakan, sampai dengan hari ini, hanya satu negara, Vanuatu di Pasifik Selatan, yang secara publik dan konsisten mempertahankan dan eksplisit pernyataan dan *commitmentnya* mendukung hak masyarakat Papua untuk keluar dari NKRI dan mendirikan negara sendiri.

Secara khusus, Departemen Luar Negeri RI seharusnya tidak meremehkan kemampuan para tokoh Papua yang mengkampanyekan Papua merdeka. Bagi mereka, nasib tanah dan bangsanya adalah isu hidup atau mati, sehingga kerap kali mereka mengeksploitir kelemahan negara di bidang diplomasi internasional. Apalagi kecenderungan para diplomat untuk menggunakan *conventionalism* atau istilah-istilah hukum dan politik yang dianggap *archaic* atau kolot dan bisa dibuktikan tidak memiliki unsur kebenaran yang kuat sebagai argumentasi politik. Contoh yang sering digunakan: "Secara hukum

internasional, prinsip *uti possidetis juris* telah menjadikan Papua merdeka sejak 17 Agustus 1945 bersama dengan wilayah jajahan Belanda lainnya di Nusantara, sebab menurut hukum ini, *the boundaries of nascent post-colonial countries conforms with their pre-sovereign one* (batas wilayah negara-negara yang baru merdeka mengikuti secara seksama batas-batas wilayah jajahan sebelum negara-negara tersebut meraih kemerdekaannya). Indonesia yang lahir setelah Proklamasi, secara otomatis menjadi *successor state* atas seluruh wilayah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.

Fakta sejarah tidak demikian. Pendudukan Timor Timur selama dua setengah dekade langsung dan secara meyakinkan mendiskreditkan dan menggugurkan argumentasi pemerintah sendiri. Negara tetangga Papua New Guinea, misalnya, sebelumnya dua daerah jajahan terpisah yang sempat dikuasai oleh Inggris dan Jerman dan dikenal sebagai "*Territories of Papua and New Guinea*" di bawah mandat *League of Nations* kemudian dipaksakan oleh Australia dan PBB untuk menyatu dalam satu negara, yakni, "*The Independent State of Papua New Guinea*". Lebih jelas lagi, kasus India sebagai bekas koloni Inggris, hari ini berdiri dalam bentuk tiga negara terpisah dan berdaulat: India, Pakistan dan Bangladesh. Vietnam moderen adalah gabungan dua bekas jajahan, masing-masing pernah dikuasai oleh Perancis dan Amerika. Ada beberapa contoh lainnya lagi di Afrika, Pasifik dan Karibia.

Diplomasi yang tepat dan efektif dan yang akan memberi kekuatan, penguatan dan kredibilitas bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani isu Papua haruslah pertama dan terutama berlandaskan fakta nyata tentang komitmen kita bersama untuk merealisasikan pembangunan di semua sektor di Tanah Papua. Dunia tidak percaya lagi informasi yang bersumber dari pemerintah dan apalagi yang cenderung berbau propaganda atau rekayasa, sedangkan fakta lapangan tidak mendukung. *Clear Policy Guidelines* sangat diperlukan dalam penggunaan *Information and Communication Technology* (internet, media massa, dan sebagainya, termasuk menggunakan wartawan baik domestik maupun internasional) untuk secara proaktif menyebarkan informasi faktual tentang situasi dan kondisi pembangunan di Papua. Dalam semuanya ini, pemerintah sewajarnya meng-*engage* tokoh-tokoh Papua dalam melaksanakan diplomasi luar negeri pada umumnya guna meredam isu internasionalisasi masalah Papua, terlebih di kawasan-kawasan yang secara khusus memerlukan cara pendekatan budaya atau *cultural diplomacy*.

Indonesia kedepan sangat berhak, mampu dan layak memiliki sebuah *image* baru di awal milenium ini. Indonesia sebagai satu bangsa dan negara

besar memiliki ketulusan hati dan ketekunan batin untuk ikut berdiri di barisan terdepan dalam mengangkat aspirasi untuk membangun *A New World Order* yang berlandaskan pada *The Principle of Common Humanity*, yakni mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dalam satu kebersamaan dan keharmonisan sebagai jawaban bagi penduduk bumi di hari esok. Akhirnya, dengan demikian citra, kredibilitas, dan nama baik pemerintah, bangsa, dan negara dapat dipulihkan serta menghilangkan *image* lama yang membuat Indonesia sering dilihat sebagai negara retorika, rekayasa dan propaganda yang sengaja didesain untuk menyembunyikan fakta dan kebenaran.

Fakta
setengah dekade langung dan secara meyakinkan mendiskreditkan dan
menggunakan argumentasi pemerintah sendiri. Negara tetangga Papua New
Guinea, misalnya, sebelumnya dua daerah jajahan terpisah yang sempat
dikuasai oleh Inggris dan Jerman dan dikenal sebagai "Territories of Papua
and New Guinea" di bawah mandat League of Nations kemudian dipisahkan
oleh Australia dan PBB untuk menyatu dalam satu negara, yakni, "The
Independent State of Papua New Guinea". Lebih jelas lagi, kasus India
sebagai bekas koloni Inggris hari ini berdiri dalam bentuk tiga negara
terpisah dan berdaulat: India, Pakistan dan Bangladesh. Vietnam modern
adalah gabungan dua bekas jajahan, masing-masing pernah dikuasai oleh
Perancis dan Amerika. Ada beberapa contoh lainnya lagi di Afrika, Pasifik dan
Kahaba.

Diplomasi yang tepat dan efektif dan yang akan memberi kekuatan,
penguatan dan kredibilitas bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani isu
Papua haruslah pertama dan terutama berdasarkan fakta nyata tentang
komitmen kita bersama untuk merealisasikan pembangunan di semua sektor
di Tanah Papua. Dunia tidak percaya lagi informasi yang bersumber dari
pemerintah dan apalagi yang cenderung berupa propaganda atau rekayasa,
sedangkan fakta lapangan tidak mendukung. Clear Policy Guidelines sangat
diperlukan dalam penggunaan Information and Communication Technology
(internet, media massa, dan sebagainya), termasuk menggunakan
baik domestik maupun internasional) untuk secara proaktif menyebarkan
informasi faktual tentang situasi dan kondisi pembangunan di Papua. Dalam
semuanya ini, pemerintah sebaiknya meng-engage tokoh-tokoh Papua dalam
melaksanakan diplomasi luar negeri pada umumnya guna meredakan isu
internasionalisasi masalah Papua, terlebih di kawasan-kawasan yang secara
khusus memerlukan cara pendekatan budaya atau cultural diplomacy.

Indonesia kedepan sangat berhak, mampu dan layak memiliki sebuah
image baru di awal milenium ini, Indonesia sebagai satu bangsa dan negara